

## ABSTRAK

Dewiyanti: **“Evaluasi Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) Lingkup Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kelurahan Pasir Impun Kecamatan Mandalajati Kota Bandung Tahun 2018”**

PIPPK merupakan salah satu program yang dicanangkan oleh Walikota Bandung dan tertuang di dalam Peraturan Walikota Bandung Nomor 281 Tahun 2015. Pemerintah Kota Bandung berharap dengan adanya PIPPK ini dapat mewujudkan sinergitas kinerja aparatur kewilayahan dengan lembaga kemasyarakatan.

Tujuan dari penelitian ini tidak lain adalah untuk mengetahui seberapa besar faktor penghambat yang dihadapi pelaksana beserta seberapa besar manfaat dari PIPPK lingkup PKK untuk masyarakat setempat.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Dengan subjek penelitiannya kepada Lurah, Ketua Program Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Ketua PKK, Ketua Pokja I PKK, Ketua Pokja II PKK, Ketua Pokja III PKK, Ketua Pokja IV PKK dan masyarakat setempat. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini meliputi reduksi data, penyajian data dan kesimpulan.

Penelitian ini bertolak kepada maksud dan tujuan PIPPK yaitu untuk meningkatkan peran, tugas beserta fungsi aparat kewilayahan dengan seluruh stakeholders Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dalam rangka percepatan pembangunan melalui pengembangan pemberdayaan masyarakat.

Hasil penelitian evaluasi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan PIPPK Lingkup PKK Kelurahan Pasir Impun Kecamatan Mandalajati Kota Bandung Tahun 2018 belum terealisasi dengan maksimal. Adapun aspek yang paling menonjol dalam menyebabkan kurangnya pengimplementasian PIPPK ini adalah masalah anggaran dan pemberdayaan masyarakat yang kurang diperhatikan.

Adapun faktor pendukung dalam pelaksanaan PIPPK Lingkup PKK Kelurahan Pasir Impun Kecamatan Mandalajati Kota Bandung Tahun 2018 ini adalah dengan kuatnya partisipasi antar masyarakat dan para stakeholders yang bersangkutan, struktur organisasi yang jelas, prosedur dan jadwal kegiatan yang jelas serta terdapat komunikasi yang baik antara masyarakat dan aparatur pemerintah.

**Kata Kunci:** Evaluasi, PIPPK, PKK, Implementasi, Partisipasi